

TAJUK RENCANA

Menyambut Strategi Sultan Atasi Inflasi-Kemiskinan

ANGKA kemiskinan penduduk DIY yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional, mampu membuat gusar banyak pihak. Apalagi bila mengingat bila warga DIY ini memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi dibanding provinsi lain. Yang menjadi sangat menarik, realita dari : miskin tapi bahagia, dan istilah *kere horeelah*, yang kemudian muncul.

Memberantas kemiskinan tidak identik dengan memberantas orang miskin. Ketika berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan, tentu ada hal lain yang perlu dilihat. Perlu diurai kembali apa yang membuat sulitnya angka kemiskinan turun. Memahami bila realita yang terjadi tidak semudah membalikkan tangan, menjadi wajib.

Ada yang rumit yang harus dilihat dan diurai satu persatu. Maka menjadi tepat ketika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X berseru agar para bupati/walikota bekerja lebih cerdas, tidak hanya melakukan segala sesuatu sesuai adat kebiasaan. Sultan bahkan menginginkan pimpinan instansi tidak hanya berfikir makro tapi juga mikro. Sehingga akan bisa mengambil kebijakan lebih baik, lebih detail (KR/16/3).

Ibaratnya, amsal Sultan, jangan lagi jual beras murah di pasar besar. Jika ini yang terjadi, beras murah menurut Sultan hanya akan dibeli pedagang, bukan dibeli masyarakat secara langsung yang memang memerlukan. Dengan demikian, rakyat kecil yang tidak mampu akan bisa membeli beras sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mengubah strategi pengendalian inflasi dengan memantau level pasar kecil kalurahan menurutnya menjadi lebih tepat dilakukan.

Strategi Gubernur DIY ini menarik dicermati. Karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa semata-mata mengandalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Mengingat upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dibarengi dengan upaya menjaga inflasi, khususnya inflasi dari kelompok makanan dan garis kemiskinan. Dan inflasi yang juga perlu dibarengi dengan upaya menjaga inflasi, khususnya inflasi dari kelompok makanan dan garis kemiskinan. Dan inflasi yang juga perlu dibarengi dengan upaya menjaga inflasi, khususnya inflasi dari kelompok makanan dan garis kemiskinan.

Meski demikian Gubernur juga harus melihat dengan cermat sebab-sebab yang membuat lambatnya penurunan angka kemiskinan di daerah istimewa ini. Artinya, dimensi kemiskinan ini perlu dikaji lebih mendalam serta serius. Dengan mengkaji dalam sekaligus memahami cermat, maka solusi untuk mengurangi sekaligus mencari solusi mengatasi inflasi dan kemiskinan akan bisa dilakukan lebih terencana.

Sehingga seruan yang mengajak bupati/walikota lebih cerdas memunculkan strategi yang tidak biasanya, harus disambut. Para bupati/walikota harus berani memunculkan upaya yang mungkin bahkan *out of the box* dalam mengurangi angka kemiskinan serta mengupayakan kesejahteraan rakyat. Dinamika dunia yang cepat, menuntut perubahan pemikiran dengan cepat pula, untuk membawa rakyat ke gerbang kemerdekaan dari kemiskinan.

Sambut tantangan Gubernur DIY. Singkirkan kata biasanya hanya demikian... "Masyarakat DIY menunggu kiprah para bupati/walikota untuk *gercep* menunjukkan kualitas dan kinerjanya. Untuk membangun negeri terlebih mengantisipasi peningkatan kemiskinan diperlukan kecerdasan strategi dan tentu saja gerak cepat." □-d

One man's trash is another man's treasure

PERIBAHASA tersebut berarti bahwa sampah atau limbah milik seseorang bisa jadi merupakan harta karun bagi orang lain. Sepertinya kutipan tersebut cukup sesuai dengan kondisi saat ini, dimana kegiatan *thrifting* atau berburu barang impor bekas menjadi salah satu kegemaran sejumlah kalangan. Maka tidak heran apabila sepatu dan pakaian impor bekas masih terus berdatangan ke Indonesia karena pasarnya juga masih banyak. Padahal negara lain menganggap pakaian bekas ini sebagai limbah yang harus didaur ulang.

Isu ini kembali berhebut kancang di tanah air setelah adanya laporan dari Reuters di akhir Februari yang lalu. Investigasi Reuters yang diterbitkan Sabtu (25/2) mengungkap, sejumlah sepatu bekas yang dijanjikan akan didaur ulang menjadi taman bermain baru dan lintasan lari di Singapura, justru diselundupkan ke Indonesia. Ditemukan berada di sejumlah pasar di Jakarta dan Batam.

Tiga Faktor
Maraknya pemicu kegiatan *thrifting* di tanah air dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor penjual, pembeli, dan regulasi. Dari sudut pandang penjual, para pedagang memilih untuk menjual pakaian bekas impor karena kualitasnya lebih baik jika dibandingkan dengan produk lokal. Dari sudut pandang pembeli, mereka tentunya mencari pakaian bekas bermerek dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Terakhir, apabila ditinjau dari segi regulasi maka transaksi ekspor-impor barang-barang bekas ini belum memiliki regulasi yang ketat secara global.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan melalui Permen Dag RI Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Barang yang Dilarang Impor. Pasal 2 ayat (3) tertulis bahwa barang yang dila-

Chanel Tri Handoko

rang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Melalui peraturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pakaian bekas impor yang diperjualbelikan secara bebas merupakan tindakan ilegal.

Sementara itu sanksi yang akan diterima oleh pedagang juga tergolong berat, mulai dari pemusnahan barang, penghentian usaha perdagangan, dan



KR-JOKO SANTOSO

pencabutan izin, denda, hingga hukuman pidana. Lantas, mengapa barang impor bekas, khususnya pakaian dan sepatu bekas masih banyak diselundupkan ke Indonesia? Hal ini mengindikasikan masih lemahnya sinergi pengawasan yang dilakukan antar Kementerian/Lembaga.

Selain dari aspek legalitas, budaya *thrifting* menimbulkan beberapa ancaman yang tidak disadari. Pertama, ancaman kesehatan. Banyak pakaian atau sepatu bekas dijual pedagang tanpa melalui proses pembersihan dan refabrikasi. Hal tersebut tentunya berpotensi mengancam kesehatan pemakainya.

Ancaman di Balik Budaya 'Thrifting'

Kedua, mengurangi daya saing industri dalam negeri. Apalagi, saat ini industri dalam negeri masih kalah kompetitif dengan negara lain khususnya terkait persoalan upah pegawai yang mendorong terjadinya relokasi pabrik ke negara lain.

Solusi

Ada beberapa solusi terkait permasalahan maraknya impor pakaian atau sepatu bekas ini. Pertama, perlu respons kebijakan pemerintah terkait proteksi industri tekstil untuk pasar dalam negeri. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan sinergi sesuai tupoksi masing-masing Kementerian/Lembaga. Kedua, pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal bagi industri dalam negeri. Insentif tersebut sangat penting bagi keberlangsungan industri kecil dan menengah di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum pulih.

Ketiga, peningkatan inovasi produk dalam negeri, misalnya dari segi desain yang selaras dengan tren kebutuhan pasar. Keempat, edukasi kepada konsumen. Pembeli perlu mendapatkan edukasi terkait ancaman kesehatan penggunaan sepatu ataupun pakaian bekas. Pola konsumsi yang bijak tidak kalah pentingnya. Konsumen semestinya membeli produk sesuai kebutuhan. Tidak semata-mata mementingkan tren pasar dan iming-iming harga yang murah. □-d

*) **Dr Chanel Tri Handoko**, Dosen Universitas Sebelas Maret, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kursi di Trotoar 'Sumbu Filosofi'

PEMASANGAN kursi santai untuk duduk menikmati lalu lintas jalanan, bukan hal baru di Kota Yogyakarta. Bahkan zaman Walikota Herry Zudianto beberapa kursi santai sudah dipasang. Bukan hanya di sumbu filosofis, namun waktu itu di beberapa tempat. Dan ini adalah program Pemkot Yoga zaman Herry Zudianto.

Memang ini tampaknya berbeda dengan upaya memercantik sumbu filosofi, yang diresmikan Gubernur DIY. Waktu peresmian, bahkan Gubernur sempat bergambar bersama beberapa tokoh Yoga dengan duduk di salah satu bangku di depan Hotel Garuda. Menampakkan kursi yang indah, trotoar yang luas dan lampu yang cantik. Benar-benar cantik. Bahkan sekarang ini kalau melewati Malioboro, entah pagi siang sore dan malam, selalu saja tampak orang santai duduk di kursi-kursi tersebut. Menikmati keindahan jalanan Yoga.

Harus diakui, sumbu filosofi

Paraning Dumadi itu dari Tugu Lancip (seharusnya Tugu Golong Gilig) menuju ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun pemandangan apa yang tampak? Miris, karena yang terlihat adalah kekumuhan dan kerusakan kursi-kursi tinggalan Herry Zudianto. Alas duduk dan sandarannya banyak yang patah dan hilang. Kayu-kayu kursi hilang dimakan aus usia dan kena hujan panas.

Pertanyaan saya : apakah Pemkot (karena ini proyek pemkot) Yogyakarta tidak memiliki institusi yang mengawasi atau memelihara asset kota ini? Bahkan sempat suatu malam, saya melihat yang di depan kantor Kedaulatan Rakyat, kursi yang separo bagian alas duduknya sudah hilang itu kemudian dipasang kardus, diberi seleme dan dijadikan tempat pijat serta buka aura. Luar biasa istimewa... □-d

*) *Yanti, Jl C Simanjuntak Terban Kota Yogyakarta*

Vibrasi Kebangkrutan Perbankan

SEMUA mata dan perbincangan tertuju pada kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang merupakan raksasa perbankan dunia. Ahli ekonomi dan pengamat lalu mengkaitkan kejadian ini dari masing-masing perspektif. Ketakutan dan pesimisme dan seolah-olah di depan mata akan terjadi menuju resesi ekonomi. Belum lagi tingginya inflasi yang dialami negara-negara Eropa yang masih mengandalkan pada pengendalian suku bunga. Tentunya hal ini akan lebih kompleks karena akan terkait dengan sektor bisnis yang dominan, termasuk harus memperhatikan psikologis masyarakat.

Bank Indonesia bereaksi dengan menahan suku bunga acuan ditingkat 5,75% persen sebagai antisipasi guncangan yang ditimbulkan rapat dewan gubernur (RDG) Maret 2023. Kebijakan yang bersifat pruden ini perlu dilakukan di tengah volatilitas dan guncangan ekonomi global yang sedang menuju pemulihan. Pengendalian suku bunga, kemampuan peningkatan cadangan devisa, menjaga tingkat keyakinan konsumen, serta pengendalian inflasi merupakan pilar-pilar yang harus terjaga. Agar pemulihan ini dapat terus berjalan menuju arah yang membaik.

Menyalahkan
Sayangnya banyak pengamat yang menyalahkan kejatuhan raksasa perbankan itu salah satunya terkait dengan start-up yang selama ini disanjung dan dibanggakan semua orang, termasuk pemerintah. Kenaiakan suku bunga, menurunnya optimisme investor, dan beralihnya kegiatan serba online menuju hybrid, menyulitkan start-up dalam mengembangkan bisnisnya seperti saat masa pandemi. Bakar uang dan ekspansi jor-joran tidak dapat lagi dilakukan leluasa. Mereka terpaksa memangkas ribuan tenaga kerja untuk melakukan efisiensi dan *cost-cutting*. Cepat disanjung dan cepat disalahkan, itulah nasib start-up saat ini.

Suparmono

Belum lagi blunder yang mendorong masyarakat untuk terus memacu konsumsi dan jangan banyak menyimpan uang di bank yang digaungkan petinggi negeri ini, seolah membuat ambigu masyarakat. Katanya takut inflasi, tapi perilaku konsumsi harus terus didorong. Belum lagi tawaran menggiurkan obligasi ritel dan sukuk dengan bunga 6,4% tentunya akan menahan hasrat mengkonsumsi masyarakat. Bukankah ini blunder yang membingungkan. Tapi oke lah apapun itu, yang penting indeks keyakinan masyarakat terhadap prospek perbaikan ekonomi ke depan terus mengalami peningkatan. Ini merupakan modal bagi pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan untuk terus optimis mencapai perbaikan ekonomi pascapandemi.

Begitu pentingnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi, terutama terhadap stabilitas perbankan. Kepanikan nasabah terhadap SVB dan Signature Bank menimbulkan *bank run* melalui penarikan besar-besaran dana nasabah karena ketakutan bank akan tidak mampu mengembalikan uang mereka. Kepanikan terus merambat dan tentunya menjadi *bubble* yang tak terkendali. Itu yang tidak kita inginkan terjadi di masa pemulihan ini. Kepercayaan kepada perbankan, optimisme terhadap Bank Indonesia, harapan OJK mampu menjaga kesehatan bank. Tak kalah penting terhadap Lembaga penjamin simpanan (LPS) sangat menentukan vibrasi dari goncangan perbankan dunia saat ini.

Menjaga Kredibilitas

Hal terpenting saat ini adalah menjaga kredibilitas dan keper-

cayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Rontoknya kepercayaan masyarakat kepada pengampu pajak tidak menutup kemungkinan akan merembet kepada penyelenggara negara lain. Terlebih penyelenggara negara tersebut sudah dimanjakan dengan digelontorkannya berbagai tunjangan dan remunerasi yang membuat gerah masyarakat, termasuk penyelenggara negara yang tidak diistimewakan tersebut. Masyarakat semakin cerdas berhadapan dengan kasus semacam ini dan dipercaya ini adalah fenomena gunung es yang selalu terulang dan tenggelam kembali seiring waktu.

Pesan utamanya adalah, pemulihan dan penguatan fundamental ekonomi pascapandemi yang diiringi dengan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan dinilai mampu meredakan vibrasi yang ditimbulkan dari guncangan dan ketidakpastian global. □-d

*) **Dr Suparmono MSi**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogyakarta

Pojok KR

Cak Imin cek kesaktian Yusril
-- Siapa yang disebut Yusril untuk 2024?

Tingkatkan pengawasan, 7.660 bus diperiksa
-- Lebih baik mencegah...

Rugikan negara Rp 31M, EW divonis 8 tahun penjara
-- Berapa harus mengembalikan ya?

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP.A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mursahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)